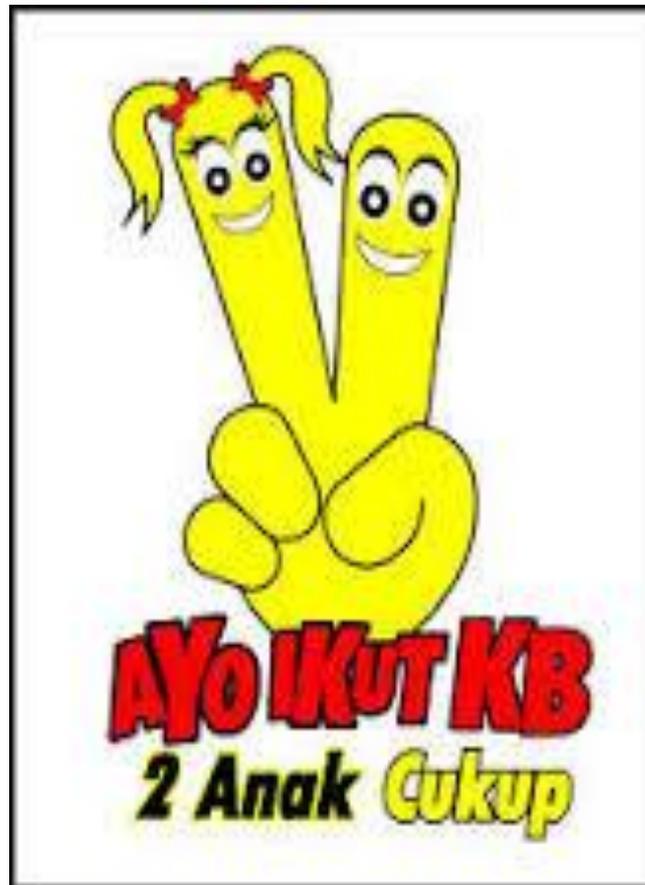


**RENCANA KERJA
(R E N J A)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2021**

HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA DPPKBPPA TAHUN 2021

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DPPKBPPA
TAHUN 2021

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : Juli 2020

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia

Sub Koordinator
Kesejahteraan Rakyat

Rinawati Heri Prastuti,SE.MM

NIP. 197305011996032004

Wahyuningsih,SHI

NIP. 197407232005011013

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Dokumen Perencanaan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKBPPPA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA Tahun 2019 , Capaian Renstra PD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA.....	19
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	47
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	48
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
2.6 Inovasi Perangkat daerah.....	61
2.7 Penghargaan	62
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPPKBPPPA	63
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA.....	68
3.3 Program dan Kegiatan.....	68
BAB IV PENUTUP	91

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Dinas PPKBPPA dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPKBPPA Tahun 2021 . Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKBPPA tahun 2021 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2021, adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPKBPPA Tahun 2021 adalah Antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPA selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2021
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing masing program dan kegiatan DPPKBPPA tahun 2021
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPKBPPA tahun 2021.
5. Sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi DPPKBPPA Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Semoga Rencana Kerja (Renja) DPPKBPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh DPPKBPPA Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juli 2020
Kepala DPPKBPPA
Kabupaten Temanggung

Dra WARA ANDIJANI , M M
Pembina Utama Muda
NIP . 19611029 199004 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

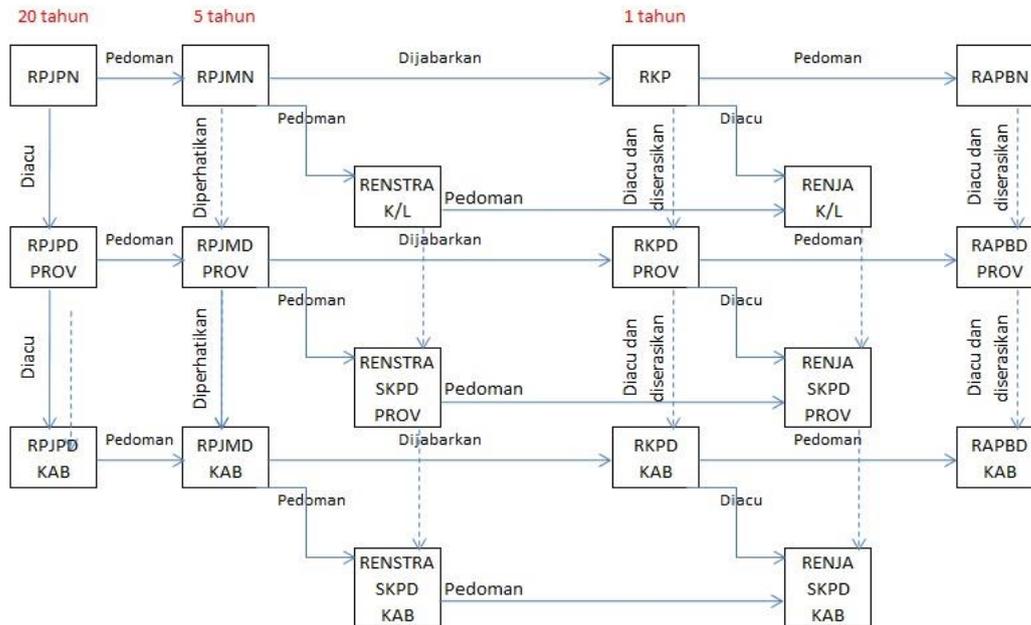
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 disusun berdasarkan dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena

refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukkan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target. **Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPKBPPA Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.**



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPKBPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPKBPPA pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPKBPPA, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPPKBPPA
- 2) Organisasi dan Tatalaksana
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra DPPKBPPA
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan ;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan ;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2021;

- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan DPPKBPPPA; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan

b. Analisis gambaran pelayanan

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPKBPPPA Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPKBPPPA

- 1) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 2) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra (untuk kondisi tahun 2019-2023);
- 3) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 4) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPKBPPPA

c. review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 berdasarkan Renstra tahun 2019 - 2023;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan PD Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPPKBPPPA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra (sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA ;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA , dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019, serta capaian kinerja Renstra DPPKBPPPA

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPKBPPPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPKBPPPA
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan .

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPPKBPPPA

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBPPPA

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPKBPPPA . Namun dalam proses ini DPPKBPPPA mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPKBPPPA terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA) dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPKBPPPA

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPKBPPPA merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pas-cakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPKBPPPA

Penyempurnaan rancangan Renja DPPKBPPPA perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

I. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan 0Renja DPPKBPPPA dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPKBPPPA dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPKBPPPA yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPPA selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan (Tahun 2021; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKBPPPA) TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKBPPPA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKBPPPA Tahun 2019 dan Capaian Renstra DPPKBPPPA Tahun 2019 -2023

Dalam Melakukan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Th 2021 diperlukan adanya Evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPKBPPPA untuk 3 tahun sebelumnya yaitu evaluasi terhadap capaian Renja th 2018 dan 2019 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPPKBPPPA sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPPKBPPPA Tahun 2019 – 2023 telah dapat dilakukan , dimana capaian kinerja tahun 2019 sebagai tahun ke –dua pelaksanaan Renstra DPPKBPPPA 2019-2023 telah dapat diketahui .

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPPKBPPA
s.d Tahun 2019**

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th, 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,	
				K	Rp,	K	Rp,	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,		
											K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
A PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																												
1	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak		100	988.330.000			100	385.000.000	206.979.150		100	50.829.636	100	18.166.200	100	74.870.450	100	54.734.850	100	198.601.136	100	95,95	100	198.601.136	100	20,81		
	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	%	25,00				26,00				0		4					5										
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,34				2,30				0,00		0,00					1,89										
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	0,011				0,015				0,002		0,002					0,002										
	Persentase terbentuknya kecamatan layak	%	60				20				0		0					20										
	Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja PD	%	45,71				38,57				0,00		0,00					28,57										

No	Bidang / Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th, 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	
a	Fasilitasi dan Advokasi Pengembangan Kota Layak (KLA)	Terfasilitasinya kegiatan KLA dan penyusunan raperda KLA	kec/desa	60	149.615.000			8	80.000.000	54.776.750	0	15.607.136	0	2.583.000	0	28.585.450	8	7.477.900	8	54.253.486	100,00	99,04	8	54.253.486	13,33	36,26	
b	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	keg	35	132.820.000			7	40.000.000	14.895.000	0	973.000	2	2.735.000	3	3.305.000	2	7.728.250	7	14.741.250	100	98,97	7	14.741.250	20,00	11,10	
c	Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG	Terlaksananya fasilitasi pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG (rakor2 PUG data pilah)	rakor / opd	145	142.820.000			29	50.000.000	18.513.700	5	1.230.000	6	2.533.700	14	7.832.500	4	1.665.000	29	13.261.200	100	71,63	29	13.261.200	20,00	9,29	
d	Fasilitasi kegiatan Forum anak	Fasilitasinya program kegiatan forum anak	keg	5	142.820.000			1	50.000.000	21.849.900	0	280.000	0	175.000	0	6.460.000	1	14.307.400	1	21.222.400	100	97,13	1	21.222.400	20,00	14,86	
e	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG,anak dan GSIB	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUGA dan GSIB (pendataan desa binaan GSI,monev,fasilitas i lomba tk prop)	keg	30	76.410.000			5	30.000.000	18.208.600	1	2.014.600	1	5.157.500	1	4.658.000	2	6.269.600	5	18.099.700	100,00	99,40	5	18.099.700	16,67	23,69	
f	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terselenggaranya kegiatan organisasi Perempuan	keg	15	166.025.000			3	50.000.000	28.213.800	0	880.000	1	2.920.000	1	9.236.000	1	15.129.200	3	28.165.200	100,00	99,83	3	28.165.200	20,00	16,96	
g	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (PTP2A)	terfasilitasinya kegiatan PPT di kecamatan dan perlindungan anak	keg	15	86.410.000			3	40.000.000	15.499.500	0	1.243.000	0	2.062.000	1	8.378.500	2	2.157.500	3	13.841.000	100	89,30	3	13.841.000	20,00	16,02	

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,		
				K	Rp,	K	Rp,	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,		K	Rp,
											K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28		
h	Pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender	meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender bagi 35 orang eksekutif dan legislatif	org	350	91.410.000			70	45.000.000	35.021.900	41	28.601.900	0	0	29	6.415.000	0	0	70	35.016.900	100	99,99	70	35.016.900	20,00	88,31			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	94,41							
Predikat																					Tinggi								
B PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																													
1	Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga		100		3.266.140.000			100	760.000.000	617.893.600	100	25.715.000	100	18.735.400	100	244.753.450	100	292.848.500	100	582.052.350	100	94,20	100	582.052.350	100	19,65			
		Persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/ kelurahan	%	100				100			0		0		0		100		100		100		100						
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi / Unmetneed	%	6,5				6,9			0		0		0,00		11,50		11,50		33,33		11,50			1,77			
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,04				2,08			0		0		0,00		1,52		1,52		73,08		1,52			0,75			
		Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR) 15 - 19 Th)	%	26,30				27,20			0		0		0,00		29,43		29,43		91,80		29,43			1,12			
a	Pelayanan KIE KB	Tesampaikanya Program KB kepada masyarakat dan Remaja khususnya melalui jalur Sekolah	Keg	50	109.615.000			10	40.000.000	28.396.000	1	670.000	2	3.630.000	2	7.661.000	5	12.736.000	10	24.697.000	100	86,97	10,00	24.697.000	20,00	22,53			
b	Fisilitasi kegiatan PPKBD, sub PPKBD dan Kader KB	Honor PPKBD 289 org @ Rp, 450,000,Honor Sub PPKBD 1619 org @ Rp, 150,000, Pelatihan Kader KB 40 org @ Rp, 150 (uang saku)	org	1969	2.256.400.000			1.969	400.000.000	389.756.000	0	306.000	0	0	985	187.560.000	984	199.515.000	1.969	387.381.000	100,00	99,39	1.969	387.381.000	100	17,17			

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th, 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,
				K	Rp,	K	Rp,	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	
											K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
c	Penunjang DAK	Terlaksananya kegiatan DAK	keg/org	12	332.050.000			12	100.000.000	62.334.600	0	0	0	5.502.000	4	10.129.450	8	25.262.250	12	40.893.700	100,00	65,60	12	40.893.700	100	12,32	
d	Rakor kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten	terlaksananya koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten, koordinasi koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli kependudukan	bln	60	236.025.000			12	120.000.000	66.295.000	4	23.395.000	1	5.827.000	1	9.420.000	4	21.588.250	10	60.230.250	83,33	90,85	10,00	60.230.250	16,67	25,52	
e	Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB	Terdatanya jumlah peserta KB aktif	bln	60	332.050.000			12	100.000.000	71.112.000	3	1.344.000	3	3.776.400	3	29.983.000	3	33.747.000	12	68.850.400	100	96,82	12	68.850.400	20,00	20,73	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				96,67	87,93						
Predikat																				tinggi							
2	Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB		100	36.669.365.000			100	7.756.412.000	7.284.360.400	100	10.088.000	100	528.375.600	100	2.506.519.368	100	2.476.373.311	100	5.521.356.279	100	67,07	100	5.521.356.279	100	14,88		
		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	90,08			85,1			0,00	0,00			0,00		83,30			83,30		97,88		83,30		92,47		
		Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) suatu cara (all metode) pada perempuan usia 15 - 49 TH,	%	82,00			80			0,00	0,00			0,00		77,57			77,57		97,22		77,57		94,60		
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	82,00			79,79			0,00	0,00			0,00		77,57			77,57		97,22		77,57		94,60		
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	50,35			49,45			0,00	0,00			0,00		48,02			48,02		97,11		48,02		0,95		

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	satuan	Target Akhir Renstra 2023		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th, 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.																	
				K	Rp,	K	Rp,	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,																		
											K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28																	
a	Fasilitasi kegiatan Masyarakat Peduli KB	Terfasilitasinya kegiatan masyarakat peduli KB dan tersusunya Raperda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	keg	50	289.230.000			10	150.000.000	39.877.400	0	140.000	0	935.000	4	6.091.000	6	11.895.000	10	19.061.000	100	47,80	10	19.061.000	20,00	6,59																		
b	kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pemasangan Kontrasepsi	keg	100	848.075.000			20	500.000.000	356.622.000	0	9.948.000	5	76.131.500	1	16.562.500	14	83.154.500	20	185.796.500	100	52,10	20	185.796.500	20,00	21,91																		
c	Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)	Tersedianya sarpras untuk PKB dan kegiatan KB	keg	5	7.875.000.000			1	1.575.000.000	1.356.449.000	0	0	0	0	1	873.600.000	0	425.461.000	1	1.299.061.000	100	95,77	1	1.299.061.000	20,00	16,50																		
d	DAK non fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	terfasilitasinya kegiatan KKBPK di Tingkat Desa	keg	5	27.657.060.000			1	5.531.412.000	5.531.412.000	0	0	0	451.309.100	0	1.610.265.868	1	1.955.862.811	1	4.017.437.779	100	72,63	1	4.017.437.779	20,00	14,53																		
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	67,07																					
																				Predikat																								
3	Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga		100		468.460.000			100	190.000.000	100.206.900	100	14.790.000	1	17.857.000	100	34.509.126	10	0	10	0	100	99,50	100	99.503.376	100	21,87																		
		Persentase Keluarga sejahtera III	%	47,5				45,6									25,92		26		56,84		25,92		54,57																			
		Persentase Keluarga sejahtera III plus	%	4,3				3,8									1,88		1,88		49,47		1,88		43,72																			
		Persentase Kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun	%	48,33				48,33			29,68		0		0,00		0,00		29,68		61,41		29,68		61,41																			
a	Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)	Terbinanya 20 kelompok BKB, BKL, BKR	kelompok	100	142.820.000			20	50.000.000	40.517.500	5	4.050.000	2	2.060.000	6	8.510.000	7	25.358.250	20	39.978.250	100	98,67	20,00	39.978.250	20,00	27,99																		
b	Pelatihan UPPKS	Tertlatihnya kelompok UPPKS (perkecamatan 2 orang)	kelompok	100	109.615.000			20	40.000.000	28.039.900	5	10.530.000	1	1.850.000	14	14.562.626	0	985.000	20	27.927.626	100	99,60	20,00	27.927.626	20,00	25,48																		
c	Fasilitasi kegiatan Generasi Berencana	Terfasilitasinya penyuluhan Narkoba dan PMS,KRR, lomba genre	kelompok	100	76.410.000			20	30.000.000	19.228.500	0	210.000	12	12.437.000	8	6.529.500	0	0	20	19.176.500	100	99,73	20,00	19.176.500	20,00	25,10																		

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th, 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,																
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27																	
d	Fasilitasi Pemantapan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Terfasilitasinya pemantapan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	kegiatan	15	139.615.000			3	70.000.000	12.421.000	0	0		1.510.000	1	4.907.000	2	6.004.000	3	12.421.000	100	100,00	3	12.421.000	20,00	8,90																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				100	99,50																						
Predikat																				tinggi																							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian Dokumentasi Perencanaan ,Evaluasi data pokok dan pelaporan perangkat Daerah		100	99.256.000			100	25.000.000	20.437.700	53	7.047.400	14	1.761.800	15	1.815.000	18	9.473.500	100	20.097.700	100	99,40	100	20.097.700	100	22,26																	
a	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	tersusunya Lakip,PK,LPPD,da n rekapitulasi data SKPD	dokumen	167	18.923.000			34	5.000.000	4.856.000	10	2.478.000	8	0	8	1.815.000	8	534.000	34	4.827.000	100	99,40	34,00	4.827.000	20,36	25,51																	
b	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring,evaluasi serta pelaporan kegiatan KB dan PP di Kecamatan	kegiata	20	80.333.000			4	20.000.000	15.581.700	1	4.569.400	1	1.761.800	0	0	2	8.939.500	4	15.270.700	100	98,00	4,00	15.270.700	20,00	19,01																	
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur		100	594.100.000			100	130.000.000	129.812.800	100	14.575.199	100	9.243.357	100	35.347.137	100	47.106.708	100	106.272.401	100	67,24	100	106.272.401	100	17,39																	
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan	60	28.205.000			12	5.000.000	4.936.800	0	0	0	495.000	3	1.840.000	9	2.575.000	12	4.910.000	100	-	12	4.910.000	20	17,41																	
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	bulan	60	56.410.000			12	10.000.000	10.000.000	12	9.460.000	0	0	3	0	0	0	12	9.460.000	100	94,60	12,00	9.460.000	20,00	16,77																	
c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya service,pembelian suku cadang,pembelian BBM,Pembayaran STNK	bulan	60	424.870.000			12	100.000.000	99.876.000	1	5.055.199	1	7.067.357	3	30.320.137	7	34.924.708	12	77.367.401	100	77,46	12,00	77.367.401	20,00	18,21																	
d	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	bulan	60	84.615.000			12	15.000.000	15.000.000	0	60.000	0	1.681.000	3	3.187.000	9	9.607.000	12	14.535.000	100	96,90	24	14.535.000	40,00	17,18																	

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th. 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,					
				K	Rp,	K	Rp,	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,		K	Rp,			
											K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,												K	Rp,	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28					
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100	67,24										
Predikat																																
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perestase pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran		100	2.037.119.800			100	441.544.000	499.793.250	100	96.215.746	100	93.084.698	100	96.686.671	100	106.334.991	100	392.322.106	100	82,66	100	392.322.106	100	17,46						
		Terlaksananya tata administrasi kegiatan penyelenggaraan kantor		100				100			100		100		100				100		100	100	100			1,00						
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	282.050.000			12	50.000.000	49.992.000	3	6.779.666	3	7.209.105	3	7.660.622	3	8.270.983	12	29.920.376	100	59,85	12,00	29.920.376	20,00	10,61						
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	30.205.000			12	7.000.000	6.679.400	3	1.099.500	3	903.500	3	2.330.000	3	2.325.250	12	6.658.250	100	99,68	12,00	6.658.250	20,00	22,04						
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	60	197.435.000			12	35.000.000	26.657.000	3	3.687.000	3	4.940.100	3	8.522.500	3	9.268.500	12	26.418.100	100	99,10	12,00	26.418.100	20,00	13,38						
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	60	112.820.000			12	20.000.000	15.000.000	3	1.782.500	3	1.968.500	3	3.899.500	3	6.956.500	12	14.607.000	100	97,38	12,00	14.607.000	20,00	12,95						
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	bulan	60	13.282.000			12	4.000.000	3.999.000	3	777.500	3	434.000	3	1.768.000	3	973.000	12	3.952.500	100	98,84	12,00	3.952.500	20,00	29,76						
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai,dengan terpenuhinya bacaan dan peraturan perundang - undangan	bulan	60	10.353.800			12	2.000.000	1.920.000	3	190.000	3	570.000	3	760.000	3	380.000	12	1.900.000	100	98,96	12,00	1.900.000	20,00	18,35						
g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat,tamu dan harian pegawai	bulan	60	112.820.000			12	20.000.000	18.341.000	3	1.707.650	3	2.046.000	3	2.731.125	3	3.741.875	12	10.226.650	100	55,76	12,00	10.226.650	20,00	9,06						
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60	199.230.000			12	60.000.000	42.000.000	3	13.654.500	3	6.907.500	3	9.975.600	3	11.415.000	12	41.952.600	100	99,89	12,00	41.952.600	20,00	21,06						

i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	60	147.820.000			12	55.000.000	53.865.750	3	7.125.000	3	9.955.000	3	150.000	3	0	12	17.230.000	100	31,99	12,00	17.230.000	20,00	11,66						
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	tersedianya pembayaran honor Non PNS, lembur PNS	bulan	60	931.104.000			12	188.544.000	281.339.100	3	59.412.430	3	58.150.993	3	58.889.324	3	63.003.883	12	239.456.630	100	85,11	12,00	239.456.630	20,00	25,72						
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	82,66										
																				Predikat												

No	Bidang / Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi per Triwulan Th, 2019								Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket,					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28					
7	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kebutuhan ASN dalam penggunaan Pakaian dan Atributnya		100	6.305.800			100	6.305.800	6.305.800	100	0	100	0	100				100	45	4.588.400	45,00	72,76476		4.588.400	100	73					
b	peningkatan kapasitas sumber daya manusia	ternilainya angka kredit Penyuluh KB	orang	45	6.305.800			45	6.305.800	6.305.800	0	0	0	-	0	-	45	4.588.400	45	4.588.400	100	72,76	45	4.588.400	100	73						
																				Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100	72,76										
																				Predikat	tinggi											
JUMLAH					44.129.076.600				9.694.261.800	8.865.789.600		219.260.981		687.224.055						6.924.793.748												
																				Rata-rata Capaian Kinerja PD (%)	99,52	81,65										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																				AT		: komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi dari pimpinan pada saat penyelesaian kegiatan (contoh)										
Faktor penghambat pencapaian kinerja																				: kurangnya kompetensi dan kuantitas pegawai (contoh)												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																				: perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan pada triwulan II, III, dan IV dalam rangka tercapainya target kinerja (contoh)												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya																				: untuk tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA												

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja DPPKBPPA di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Tahun 2019-2023. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPKBPPA

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPKBPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa DPPKBPPA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat baik "** yaitu dengan nilai **99,52 %**.. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Capaian Kinerja : 99.04 % kategori sangat baik

2. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak

Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2019 ini :sebagian besar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra DPPKBPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPPKBPPA

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPPKBPPA sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah DPPKBPPA beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPKBPPPA)
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2019 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	94,45	94,35	94,25	94,15	95,62			..		100	TT
2	Persentase perempuan anak korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01	0,009			..		100	TT
3	Prevalensi terhadap anak perempuan kuban kekerasan	%	26	25,9	25,67	25,56	25	100					100	TT
4.	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89					80,64	AT
5	Persenase terhadap anak perempuan kuban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,01	0,009					79,05	AT
6	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40					66,67	AT
7	Rasio PD yang menerapkan kebijakabresponsig gender dalam penyusunan ARG	%	32,28	38,57	38,57	38,57	45,7	43,48					95,12	
8	Laju pertumbuhan Penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88			..		90,91	TT
9	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100			..		100	TT
10	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	6,72	6,65	6,5	11,44			..		33,33	AT
11	pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,6	2..08	2,07	2,06	2,05	2,04					100	TT
12	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,20	27,00	26,80	26,50	26,30	29,43					89,37	

13	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,10	86,28	87,36	90,08	90,1	83,03					92,17	AT
14	Angka pemakaian kontrasepsi (<i>contraseptive prevalence rate/CPR</i>)	%	79,79	80,78	81,23	81,34	82	77,50					94,51	AT
15	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,79	81,23	81,34	82,00	77,50					95	AT
16	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	49,85	50,15	50,4	48,02					96,38	TT
17	Persentase keluarga sejahtera III	%	45,6	46	46,5	47	47,5	25,92					54,57	
18	Persentase keluarga sejahtera III Plus	%	3,8	4	4	4,2	4,3	1,88					43,69	
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	48,33	48,33	48,33	29,82					61,69	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 terdiri dari:
 - a. Indek pembangunan Gender
 1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah tingginya angka harapan hidup perempuan sebagai salah satu indikator IPG
 2. Faktor penghambat adalah masih rendahnya penghjasilan perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut review target RPJMD
 - b. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan
 1. Faktor pendorong adalah kerjasama jejaring dalam pendampingan penanganan kasus
 2. Faktor penghambat adalah keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut penguatan kapasitas pendampingan korban dan peluasan jejaring
 - c. Prefalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
 1. Faktor pendorong kerjasama jejaring dalam penanganan kasus
 2. Faktor penghambat adalah keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut penguatan kapasitas pendampingan korban dan peluasan jejaring
 - d. Presentase penyediaan data mikro keluarga di desa
 1. Faktor pendorong adanya kegiatan pendataan dan updating data keluarga
 2. Faktor penghambat lemahnya sistem pelaporan dan administrasi di tingkat RT
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut pelaksanaan pendataan dan adanya perda tentang pengendalian penduduk dan KB
 - e. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 th
 1. Faktor pendorong
 - Terintegrasinya BKR dan PIK Remaja
 - Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 - Pengembangan life skill bagi remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga
 2. Faktor penghambat masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dalam memberikan advokasi pada masyarakat dan masih adanya aturan yang berbeda antar opd
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut melakukan promosi KIE melalui media cetak elektronik

2. Capaian indikator dengan status tercapai ada 6, terdiri dari:
 - a. Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
 1. Faktor pendorong meningkatnya harapan lama sekolah bagi perempuan
 2. Faktor penghambat partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
 - b. Presentase perempuan dan anak korban kekerasan
 1. Faktor pendorong kerjasama jejaring dalam penanganan kasus
 2. Faktor penghambat adalah keterbatasan dan kemampuan petugas pendamping
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring
 - c. Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD
 1. Faktor pendorong adanya bimtek penyusunan ARG
 2. Faktor penghambat masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG
 - d. Angka kelahiran remaja usia 15 sampai 19 th (ASFR 15- 19 Th)
 1. Faktor pendorong kecilnya kelahiran pada kelompok umur 15- 19 th
 2. Faktor penghambat belum tersedianya data ASFR setiap tahun
 3. Rekomendasi dan tindak lanjut pendataan tiap tahunnya
 - e. Presentase PUS yang memakai kontrasepsi
 1. Faktor pendorong tingginya kesadaran masyarakat untuk berKB
 2. Faktor penghambat tidak semua masyarakat dengan keyakinan tertentu menerima kontrasepsi
 - f. Presentase keberhasilan pemakaian kontrasepsi MKJP
 1. Faktor pendorong tingginya animo masyarakat dalam penggunaan alkon implan
 2. Faktor penghambat
 - masih tingginya rumor kegagalan IUD
 - belum semua tenaga pelayanan MOP bersertifikat
 - biaya pelayanan tinggi
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 5 terdiri dari:
 - a. Presentase terbentuknya Kecamatan layak anak
 1. Faktor pendorong adanya integrasi program yang mendukung, KELANA (kecamatan layak anak)
 2. Faktor penghambat rendahnya pendampingan KELANA

- b. Presentase pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi/unmetneed
 - 1. Faktor pendorong meningkatnya KIE kepada masyarakat
 - 2. Faktor penghambat rendahnya pemahaman batasan pasangan usia subur (PUS) bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
- c. Presentase keluarga sejahtera
 - 1. Faktor pendorong
 - Meningkatnya faktor ekonomi sosial dan pendidikan dalam keluarga
 - Tingkat sosial dan kepedulian yang tinggi
 - 2. Faktor penghambat masih lemahnya pemahaman masyarakat untuk indikator keluarga sejahtera
- d. Presentase kampung KB yang memenuhi indek desa membangun (IDM)
 - 1. Faktor pendorong otensi kader dalam mendukung program dan partisipasi masyarakat
 - 2. Faktor penghambat belum adanya pergub dan perda tentang kampung KB

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada DPPKBPPPA terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang .Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , dengan rincian sebagai berikut:

4. Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**

1. **Indek Pembangunan Gender**

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah Pencapaian kemampuan pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG ini digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan (indek yang ada indikator pembangunan manusia yang dipilah gender)

Untuk memperoleh angka Indek Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi :

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata – rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Indek Pembangunan Gender
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	na	94,75	94,75	96,00	96,00	95,62*

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Tabel A.1.2

Indikator IPG

Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,56	77,33	12,04	12,27	7,12	6,71	10,28	8,454
2	Jawa Tengah	72,16	76,02	12,52	12,63	7,79	6,78	14,21	9,207

Indikator IPG tabel A.1.2 tahun 2019 belum tersedia dari BPS sehingga Data yang di sajikan adalah tahun 2018

Dari tabel 1.1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2018 terealisasi sebesar 96,00. Berdasarkan Laporan pembangunan manusia berbasis gender Kementrian PP dan PA th 2019 capaian IPG Kab Tmg 95,62, menurun dari tahun 2018. Namun pada angka pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang nilainya sebesar 91.03 dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat propinsi Jawa tengah sebesar 91,94 %. untuk tingkat propinsi berfada pada rangking 2 se Jawa Tengah .Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,33 dibandingkan laki laki 73,56, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi yaitu 12,27 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu 12,04, akan tetapi angka Rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,12 dibandingkan perempuan yaitu 6,71 , sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,80, dibandingkan dengan

perempuan 8,454. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG sampai pada tahun 2019 ini yang mendukung RPJMD kabupaten Temanggung ternyata ada kesalahan target , yang seharusnya target kinerja indikator ini naik , tetapi malah justru menurun .

2.Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional ,atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak . berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran,termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak kurban kekerasan yang melapor dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kab. Tmg th 2014 s.d 2019 Triwulan IV sebagaimana Tabel Berikut

Tabel 2.4
Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	63	37	39	45	24	48
2	Jumlah perempuan dan Anak	546.688	549.337	551.996	551.996	551.996	551.996
3	Persentase	0,0089	0,0067	0,0071	0,0081	0,0030	0,008

Sumber : DPPKBPPA tahun 2019

Tabel 2.5
Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	KDRT	2	15	1	4	5	13
2	Kekerasan terhadap anak				1		
3.	Perkosaan		7	2	2		
4.	Perbuatan tidak menyenangkan	-					1
5	Traffeking						
6.	Pembuangan anak				2		
7.	Penelantaran	1	4	5	5	3	6
8.	Perzinaan						
9.	Kekerasan terhadap TKW						
10.	Kekerasan dalam pacaran		2	3			
11.	Pencurian (ABH)			6	7		4
12.	Sodomi						3
13.	Kekerasan seksual anak						
14.	Kekerasan seksual (disabel)						1
15.	Pelecehan seksual	52		2	20		4
16.	Kekerasan Fisik	8		2			
17.	Persetubuhan Anak			14		7	10
18.	Membawa lari anak			2			
19.	Pencabulan		8				4
20.	TPPO				2		1
21.	Bunuh diri anak						1
22.	Penganiayaan			2	4		
	JUMLAH	63	36	37	45	15	48

Sumber DPPKBPPPA tahun 2019

Dari tabel 2.1 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung cenderung menurun dari tahun 2014 sampai dengan th 2019 Triwulan III, Akan tetapi tribulan IV jumlah kasus kekerasan semakin naik mencapai angka 48 , atau 0,008 . jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 2.2 terlihat tren peningkatan pada kasus tertentu yaitu kasus pelecehan fisik dan kasus persetubuhan anak tahun 2017 dan 2018. Jika dilihat dari usia maka persebaran kasus terbanyak ada pada usia anak-anak dengan kasus pelecehan seksual. Sampai triwulan IV ini ada laporan kasus penelantaran dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 2 kasus , dan sudah mulai ditindaklanjuti penanganannya.

Jumlah Kasus yang fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang mengetahui kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang tanpa atau terlapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut sudah dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan. Namun berdasarkan laporan kasus beberapa tahun dapat disimpulkan kejadian yang dilaporkan hanya dari kecamatan Temanggung, Kranggan, Selopampang, Bulu, dan Kandangan. Jumlah kasus terbanyak pada tahun 2019 tribulan IV, karena KDRT, selanjutnya adalah persetubuhan anak .

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan.

3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus :kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadukan dibandingkan dengan kasus anak yang ditangani dikalikan 100% .

Tabel 2.6
Pervalensi perempuan dan anak korban kekerasan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor	49	36	39	43	15	16
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani	49	36	39	43	15	16
3	Persentase	100%	100%	100%	100 %	100%	100%

Sumber DPPKBPPA tahun 2019

Dari tabel 3.1 terlihat semua kasus yang melapor semuanya 100% tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persaedur. Jumlah seluruh kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2014 semakin menurun pada tahun 2018 , akan tetap pada tribulan iv ini naik kembali menjadi 16.

4. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah .

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2019 sampai triwulan III sebanyak 1,94% ,sebagaimana pada Tabel 4.1.berikut ini.

Tabel 2.7
 Persentase keterwakilan dilembaga pemerintah
 Kabupaten Temanggung Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	3850	4227	4099	4216	4508	3711
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	190.835	190.835	193.193	196.675	196.675	196.675
Persentase		2,017	2,21	2,12	2,14	2,29	1,89

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2019

Dari tabel diatas Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten Temanggung cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai 2018, namun pada tahun 2015 ke 2016 ada penurunan dari 2,21 % menjadi 2,12 %, sedangkan pada tahun 2019 cenderung menurun lagi disebabkan pensiun/purna bagi ASN perempuan.

5.Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak adalah pembangunan di tingkat kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Desa/kelurahan layak anak adalah pembangunan di tingkat Desa /Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa /Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa / Kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 Triwulan IV sebagaimana tersebut pada

Tabel 2.8
Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2015	2017	2018	2019
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	0	0	0	4	8
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20 %	20%	20 %	20%	20 %	40%

Sumber DPPKBPPPA

Hingga saat ini baru ada 8 kecamatan dan 8 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk, yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Kedu dan Ngadirejo ,gema-wang,selopampang,parakan dan kaloran dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampiroso dan Kertosari. Pada tahun 2019 kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak , bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilihan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yan sesuai dengan indikator desa/ kelurahan layak anak. Sedangkan 4 kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak. Indikator-indikator tersebut minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

1. Hak Sipil dan kebebasan lingkungan keluarga
2. Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan .Pemanfatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

6. Rasio PD yang menerapkan kebijakan responsif gander dalam penyusunan renja SKPD

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan adalah perencanaan yang responsif gender. Perencanaan Pembangunan responsif Gender adalah Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipasif
3. Control ,dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terdistribusi /statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan.

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel 2.9

Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	N/A	N/A	N/A	23	23	20
2	Jumlah PD	N/A	N/A	N/A	46	46	46
	Persentase	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	43,48

Sumber DPPKBPPPA

Saat ini Perangkat Daerah yang sdh menerapkan Anggaran responsIF Gender baru 20 OPD dari 46Unit PD yang ada (28,57 %). Hal ini menunjukkan belum semua Perangkat Daerah melakukan analisis anggaran responsif gender.

7.Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 Triwulan III disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Temanggung 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	190.835	190.835	193.193	196.675	196.675	196.675
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	574.804	613.223	577.040	551.837	551.837	551.837
	Persentase	3,2	31,132	33,48	35,64	35,64	35,64

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2019

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja, terdapat penurunan pada tahun 2015 yaitu 31, 12%.

7. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	2	16	1	4	5	13
2	Jumlah Rumah Tangga	194.116	252.796	196.385	196.385	196.385	196.385
3	Rasio KDRT	1:3882	1:4044	1:1963	1:7855	1:9815	1:1510

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center* (WCC), Unit Pelayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

8. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tenaga kerja dibawah umur adalah seseorang yang dipekerjakan pada usia anak-anak, menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa *pengusaha dilarang mempekerjakan anak*. Dan dalam ketentuan undang undang tersebut, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalam UU yang sama pasal 69, 70 dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 th diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Persentase dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel 2.12
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah tenaga kerja dibawah umur	N/A	1521	1521	1521	1521	1521
2	Jumlah jiwa anak anak	N/A	230454	230454	230454	230454	230454
Persentase		N/A	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2019

Penarikan pekerja anak merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang disajikan dari tahun 2014 s.d 2019 Triwulan III belum berubah, sesuai hitungan provinsi.

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1\} \times 100$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebesar 0,88%, masih dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 0,99%.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2014 s.d 2019

Uraian	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk	745.778	745.778	752.509	758.980	765.659	765.659
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,93	0,93	0,9	0,86	0,88	0,88

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan Tabel B 1.1 selama periode 3 tahun yaitu dari tahun 2015 s.d 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, kecuali pada tahun

2017 s.d 2018 mengalami kenaikan 0,02 % yaitu Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2017 (0,86 %) dan di tahun 2018 (0,88 %). Laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 belum bisa dihitung karena perhitungan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang dipublikasikan pada awal tahun.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri – ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali.

Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah KK yang ada dibagi dengan jumlah KK yang disajikan x 100%.

Tabel 2.14
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan
Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kepala Keluarga	221.156	224.505	231.705	232.148	219.190	235776
2	Jumlah KK yang tersajikan	221.156	224.505	231.705	232.148	219.190	235776
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2015 s.d 2019 Triwulan IV, jumlah RW mengalami tambahan yaitu di tahun 2015 bertambah 3, di tahun 2016 bertambah 6 dan di tahun 2017 bertambah 3, sedangkan jumlah KK selama 5 tahun mengalami tambahan dari 231.705 pada tahun 2015 menjadi 235.776 pada tahun 2015, namun pada tabel B 2.2 jumlah KK yang bisa di input dalam aplikasi SIGA hanya 219.190 mulai tahun 2017 s.d 2019 hal ini di sebabkan karena adanya Error Aplikasi SIGA di Pusat. Data yang tidak bisa di sinkronkan.

3.Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin anak tunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan ingin anak segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel 2.15
Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi
(Unmetneed)
Kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PUS Un meetneed	8072	8072	10292	10300	8072	15309
2	Jumlah PUS	142.704	142.704	144.641	144.401	144.426	133.827
	Persentase	5,66	5,66	7,12	7,13	5,29	11,4

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2015 – 2019 , unmetneed tertinggi di tahun 2019 (November 2019) sebesar 11,4 dari PUS 133.827, dan terendah di tahun 2015 yaitu 5,66 dari PUS 142.704. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2019 angkanya naik dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan dilini lapangan .

4.Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (pasangan usai subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 th

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th <dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 2.16
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung, tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PUS < 20 TH	3014	3014	3756	3861	2995	2038
2	Jumlah PUS	138.891	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827
3	Prosentase	2.17	2.17	2.60	2,69	2.08	1,52

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai th 2017 dan turun pada tahun 2018, pada bulan november 2019 tribulan IV persentase PUS dibawah 20 tahun cenderung menurun , Pada tahun 2019 ini sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)

5. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 – 19 Th)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu .

Sedangkan ASFR 15 – 19 Tahun . adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun . Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya,

Rumus dari pada ASFR 15- 19 th adalah :

$$\text{ASFR 15-19th} = (B \ 15 - 19 \text{ TH}) / (P_f \ 15 - 19 \text{ th}) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun

Selama 1 tahun

Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada

Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR ini di kabupaten Temanggung , yang bersumber di dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil Pendataan keluarga yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali.

Tabel 2.17
 Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelahiran	n/a	840	840	840	840	840
2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	n/a	28.543	28.543	28.543	28.543	28.543
3	Persentase	n/a	29,43	29,43	29,43	29,43	29,43

Dari tabel diatas belum bisa menyajikan pertahunnya karena dasar dari penyajian data tersebut berdasarkan up dating data setiap 5 tahun sekali ,untuk tahun depan baru dilaksanakan pada tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15 – 19 TH di kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut. Hal ini bisa dilihat dari prosentase pernikahan dini yang masih tinggi .Upaya yang telah dilaksanakan untuk menurunkannya adalah dengan komunikasi informasi dan eduksinda (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/sekolah siaga kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja). Namun kalau dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angka nya semakin menurun , hal ini menunjukkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Prosentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu tentang semua alat kontarsespsi dari proses pemasangan,jangka waktu penggunaan ,efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus persentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 % .

Tabel 2.19

PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern
Kabupaten Temanggung, tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	115.282	115.282	119.019	118.402	119.774	111.117
2	Jumlah PUS	138.891	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827
3	Persentase	83,00	83,00	82,53	82,43	83.27	83.03

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern semakin meningkat dari tahun 2014 s.d 2019 triwulan III, setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu dan efek samping alokon yang akan digunakan, namun ditahun 2019 tribulan IV cenderung menurun,dkarenakan kesertaan peserta KB nya juga menurun.

7. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau angka pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan jumlah PUS usia 15 – 49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi KB

Rumusnya adalah seluruh jumlah PUS yang menggunakan alat kontrsepsi dibandingkan sejumlah PUS yang ada kali 100 %

Tabel 2.20

Pemakaian konstrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49
Kabupaten Temanggung, tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peserta KB Aktif	115.282	115.282	119.019	118.402	119.774	103717
2	Jumlah Pasangan Usia subur	138.891	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827
3	Persentase	83,00	83,00	82,53	82,43	83.27	77,50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Jumlah kenaikan angka peserta KB aktif dari tahun 2014 sebanyak 75.37% menjadi 83.27 % pada tahun 2018 angka ini melebihi target nasional yaitu sebesar 75% . Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data pemakaian kontrasepsi Kabupaten Temanggung pada tribulan II 78.75 % dan sampai tribulan III, juga masih menurun ,karena updating data pada tribulan II , blm semua kecamatan selesai melaksanakan .

8.Persentase kepesertaan KB aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100%

Tabel 2.21
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peserta KB	115.282	115.282	119.019	118.402	119.774	103717
2	Jumlah Pasangan Usia subur (PUS)	138.891	138.891	144.210	143.639	143.830	133.827
	Persentase	75,37	75,37	83,00	82,53	82,43	77,50

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meningkat selama tahun 2015 – 2018, terendah ditahun 2015 dengan kepesertaan KB 75,37 % dari PUS 115.282 dan tertinggi ditahun 2016 dengan total 83,00 % dari PUS 119.019, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, namun sampai tribulan IV tahun 2019, pencapaian justru menurun di angka 77,50 % , hal berdasarkan hasil pemutakhiran data kembali di lini lapangan

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % dan sampai tribulan IV, juga masih menurun ,karena dari hasil up dating data dalam perkembangan cenderung masih turun

9. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant,IUD, MOP dan MOW).

Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung tahun 2014 s.d 2019 tribulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.22
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peserta KB MKJP	49503	51237	55459	56553	58695	49809
2	Jumlah (PUS) yang ber-KB	111.498	116.543	119.659	119 432	120.666	103717
Persentase		44,39	44,40	46,35	47,35	48,64	48.02

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggu

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2014 – 2019, namun diawal tahun mengalami penurunan menjadi 44,23 % , hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi .Untuk pencapaian pada tribulan IV mengalami kenaikan dibanding tribulan III,dengan pencapaian 48,02% ,hal ini dicapai seiring dengan pemutakhiran data dari kecamatan yang pada teribulan II belum semua kecamatan selesai.dan juga hasil kegiatan pelayanan KB pada moment kegiatan tertentu , yang mana permintaan masyarakat pada kegiatan tersebut adalah pelayanan KB MKJP . Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah

Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung per kecamatan tahun 2014 s.d 2019 tribulan IV dapat dilihat pada tabel berikut :

10.Persentase Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan perkembangan keluarga, tetapi belum dapat memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat dan tidak aktif sebagai pengurus kegiatan sosial .

Rumus presentase kaluarga sejahtera III adalah jumlah keluarga sejahtera III dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada dikalikan 100 %

Tabel 2.23

Presentase Keluarga Sejahtera III Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 s.d 201

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Keluarga Sejahtera III	41.725	44.901	42.777	42.816	61.119	61.119
2	Jumlah Keluarga	219 598	224.509	213.995	213.995	231.702	235776
3	Persentase	19.01	19,99	19,99	20,01	20,13	25,92

Sumber: DPPKBPPPA

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga sejahtera III pada tahun 2019 mencapai angka tertinggi tapi pada tahun 2014 angka persentase lebih rendah , hal ini terjadi karena akibat dari hasil panen tembakau yang kurang mendukung , khususnya di daerah penghasil tembakau , tapi dapat dilihat juga secara perlahan tapi pasti ada kenaikan jumlah keluarga sejahtera dari tahun 2015 sampai tahun 2019

Keluarga sejahtera III adalah salah satu indikator tujuan program KKBPK , sebelum tahun 2018 . Dinas PPKBPPPA kabupaten Temanggung , masih bisa menyajikan tahapan keluarga prasejahtera , keluarga sejahtera III dan III plus , namun mulai tahun 2018 data ini tidak bisa disajikan karena sudah menggunakan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA) , yang ada hanya tahapan keluarga sejahtera.

11. Persentase Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera III Plus adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis , perkembangan keluarga, salah satu anggota keluarga sudah menjadi pengurus kegiatan sosial dilingkungannya, dan sudah mampu memberikan sumbangan secara teratur bagi masyarakat

Rumus presentase keluarga sejahtera III Plus adalah jumlah keluarga sejahtera III plus dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada

Tabel 2.24

Presentase Keluarga Sejahtera III Plus Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 s.d 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Keluarga Sejahtera	44.901	44.901	42.750	42.816	4429	4429

2	Jumlah Keluarga	219.598	224.509	213.995	213.995	231.702	235.776
3	Persentase	20,44	19,99	19,98	20,01	19,11	18,78

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah keluarga sejahtera III Plus dari tahun 2014 semakin menurun dan pada tahun 2017 naik kembali, pada tahun 2018 sampai triwulan IV semakin menurun, hal ini seiring dengan bertambahnya keluarga sejahtera III, yang dikarenakan sebelumnya mampu memberikan sumbangan rutin, tetapi karena sesuatu hal pada tahun pendataan sudah tidak memberikan sumbangan rutin karena adanya permasalahan hasil tembakau dan juga permasalahan lain.

Keluarga sejahtera III plus adalah tujuan utama program KKBPK, sebelum tahun 2018. Dinas PPKBPPA kabupaten Temanggung, masih bisa menyajikan tahapan keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera III dan III plus, namun mulai tahun 2018 data ini tidak bisa disajikan karena sudah menggunakan aplikasi sistem informasi keluarga (SIGA), yang ada hanya tahapan keluarga sejahtera.

12. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dan desa tertinggal dikalikan 100%.

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri.

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis, yang terjabar dalam dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi, yang mana dari dimensi – dimensi tersebut terdiri dari beberapa indikator, sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa, yang berhitungannya dari rata – rata dari IKS, IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL, terdiri dari

A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi , dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan .Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

B.Desla Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ,kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama (< dan =) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0, 7072.

C.Desla berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju , yang memilikim potensi sumberr daya sosial ,ekonomi , dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa memangun kurang dan sama dengan (\leq) o,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989 .

D.Desla tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memilki potensi sumber daya sosial ,ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa tertinggal atai desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0, 59889,dan lebih besar (>) dari 0,4907.

E. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami ke-
rentangan karena masalah bencana alam , goncangan ekonomi , dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan menegelola potensi sumber daya sosial , ekonomi ,dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya . desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memilkimindek desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari o, 4907

Dilihat dari kriteria desa diatas , dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa.

Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM adalah sebagai berikut

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung belum ada
2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung ada 211
3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 48
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung ada 7 desa ,dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Tabel 2.25

Presentase kampung KB yang memenuhi IDM Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 s.d 2019

N0	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kampung KB	n/a	n/a	20	40	60	65
2	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	n/a	n/a	219	219	219	218
3	Persentase	n/a	n/a	9,13	18,26	27,40	29,82

Sumber: DPPKBPPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM , yang meliputi kriteria IDM desa tertinggal ada 7 desa, desa berkembang ada 211 dan desa maju ada 48, sedangkan jumlah kriteria desa sangat tertinggal dan desa mandiri di kabupaten tidak ada .

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 65 desa , dari 65 desa kampung KB sebagian besar masuk kriteria desa berkembang sebanyak 53 desa, desa tertinggal 1 desa, desa maju sebanyak 9 desa, dan kampung KB yang ada di kelurahan ada 2 kelurahan . Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 14,28% di desa Tertinggal, 20,41% di desa Berkembang dan 24,52% di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB , diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang , agar menjadi desa yang maju dan mandiri . maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB , adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 29,68% . Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan , untuk pencairan kampung KB selanjutnya diarahkan dengan menggunakan dana desa yang ada dan bersifat mandiri

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPKBPPPA

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA

Isu – isu strategis pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 dilakukan oleh DPPKBPPPA dengan menggunakan metoda pembobotan isu isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan semua kepala bidang, semua kabid,

pejabat fungsional dan beberapa staf serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023. Isu – isu strategis yang disepakati adalah isu – isu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab DPPKBPPPA
3. Berdampak besar pada publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya standart kompetensi seluruh tenaga pengelola program internal dan eksternal sampai ke lini lapangan
2. Belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam mendukung peningkatan SDM pengelola program KKBPK melalui pelatihan
3. Penelitian dan Pengembangan masih belum dianggap penting
4. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijaksanaan
5. Belum optimalnya kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pusat studi dan lembaga penelitian lainnya
6. Semakin berkurangnya petugas lini lapangan KB
7. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan MKJP
8. Belum efektifnya kelembagaan PUG, PUHA, pemberdayaan perempuan dan anak .
9. Rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga lembaga pengambilan keputusan publik
10. Lemahnya sistem data dan informasi gender ,anak KB dan KS
11. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
12. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Sebagaimana amanat Permendagri 90 Tahun 2019 Pasal 5 : Dalam menyusun neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

RKPD tahun 2021 yang mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 secara otomatis mengubah nomenklatur program/kegiatan sebagaimana rancangan awal RKPD yang telah disusun pada tahun 2019. Berkenaan hal tersebut maka dapat penyandingan jumlah program , kegiatan dan sub kegiatan ranwal RKPD dan Renja PD sebagai berikut :

Tabel 2.26
PERBANDINGAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN
Ranwal dan Rancangan Renja 2021

No	Uraian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jml Sub Keg
1	Rancangan Awal Renja 2021	8	39	-
2	RKPD/ Renja 2021 (Sesuai Permendagri 90/2019)	10	22	65

Tabel 2.27

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

SKPD : DPPKBPPPA KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Bidang / Program / Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD					No	Bidang / Program / Kegiatan	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD				
		lokasi	rincian indikator kinerja	Satuan	target kinerja	pagu indikator awal			lokasi	rincian indikator kinerja	Satuan	target kinerja	pagu indikator perubahan
1	2	4	5	7	6	8	1	2	4	5	7	6	9
	BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG					
A	FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
								Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	DPPKBPPPA	terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	3.300.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	DPPKBPPPA	Tersusunnya renstra dan renja opd	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	3.000.000
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Temanggung	Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan KB dan PP di Kecamatan	semester	Karyawan DPPKBPPPA	14.300.000		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPKBPPPA	Tersusunnya dokumen RKA, LKJIP, Data Pokok	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	3.872.300
								Administrasi Keuangan					
	Gaji ASN	Kab Temanggung	Terbayarkannya gaji ASN	Bulan	Karyawan DPPKBPPPA	6.558.102.268		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPPA	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	3.614.060.166
								Belanja tidak langsung					
								Belanja Pegawai					3.614.060.166

								Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.347.147.339
								Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.266.912.827
	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH						A	Administrasi Umum					
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPPA	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	17.050.000
1	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	55.000.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPPA	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	39.100.000
2	penyediaan jasa kebersihan kantor	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	5.500.000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPPA	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	10.000.000
3	penyediaan alat tulis kantor	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	38.500.000	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBPPPA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	30.500.000
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	22.000.000	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPPKBPPPA	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	282.450.000
5	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan dan kantor	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	2.200.000	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBPPPA	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	159.830.000
6	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	1.980.000	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPPKBPPPA	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	23.100.000
7	penyediaan makanan dan minuman	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	22.000.000	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBPPPA	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	9.820.000
8	Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	33.000.000	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPPA	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	2.000.000
9	Rapat-rapat dan konsultasi kedalam daerah	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	22.000.000	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPPA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	Karyawan DPPKBPPP A	15.000.000
10	Jasa pelayanan perkantoran	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	bulan	Karyawan DPPKBPPPA	176.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPKBPPPA	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	1.200.000
11	Jasa pengamanan gedung kantor	DPPKBPPPA	Terjaganya keamanan Gedung kantor	Bulan	Tenaga pengamanan	105.000.000		Penyediaan Makanan dan Minuman	DPPKBPPPA	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	15.491.000

B	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur							Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPKBPPPA	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	25.750.000
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPPKBPPPA	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Bulan	karyawan DPPKBPPPA	0		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	20.000.000
2	pengadaan peralatan gedung kantor	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	Bulan	karyawan DPPKBPPPA	10.000.000		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	10.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	Bulan	karyawan DPPKBPPPA	10.000.000		Pengadaan Mebeleur	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	50.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	DPPKBPPPA	terselesaikannya pekerjaan tepat waktu	Bulan	karyawan DPPKBPPPA	77.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	20.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPPKBPPPA	Terpeliharanya Gedung kantor	Bulan	Karyawan DPPKBPPPA	5.000.000		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	15.000.000
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	38.750.000
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	10.000.000
C	Program Peningkatan disiplin aparatur							Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPPKBPPPA			Karyawan DPPKBPPP A	
2	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DPPKBPPPA	disiplin ASN meningkat	unit	Karyawan DPPKBPPPA	0		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPPKBPPPA	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Bulan	Karyawan DPPKBPPP A	11.250.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

D	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak							PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
								Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
1	Peningkatan Kualitas Hidup bagi Anak Low Vision	Kab Temanggung	terfasilitasinya kegiatan pendataan, pemeriksaan dan pemberian kacamata pada anak low vision	anak	Masyarakat Temanggung	50.000.000		<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	20.000.000
								Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	Advokasi pengembangan kota layak anak (KLA)	Kab Temanggung	terfasilitasinya kegiatan KLA dan penyusunan raperda KLA	bulan	Masyarakat Temanggung	130.000.000		<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	50.000.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
3	kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab Temanggung	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	bulan	Masyarakat Temanggung	22.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	45.000.000
								PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
								Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
4	Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG	Kab Temanggung	terlaksananya fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) & ARG (rakor rakor PUG data pilah)	bulan	Masyarakat Temanggung	22.000.000		<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	10.000.000

								Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
5	Penyelenggaraan Kegiatan Forum anak	Kab Temanggung	terfasilitasinya program forum Anak	bulan	Masyarakat Temanggung	22.000.000		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	10.000.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
6	Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, anak dan GSIB	Kab Temanggung	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PUG dan ARG	bulan	Masyarakat Temanggung	11.000.000		<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	10.000.000
								PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
								Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
7	Peningkatan kapasitas Organisasi Perempuan	Kab Temanggung	Terselenggaranya kegiatan organisasi Perempuan	bulan	Masyarakat Temanggung	27.500.000		<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	20.000.000
								PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
								Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					

8	pengembangan pusat pelayanan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (PTP2A)	Kab Temanggung	terlaksananya pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a)	bulan	Masyarakat Temanggung	11.000.000		<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	45.000.000
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
9	Pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender	Kab Temanggung	terlaksananya pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender (perempuan eksekutif dan legislatif)	bulan	pemangku jab di KB TMG	11.000.000		<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	50.000.000
								PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
								<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>					
								Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	10.000.000
B	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Pelayanan KIE KB	Kab Temanggung	Tesampaikanya Program KB kepada masyarakat dan Remaja khususnya melalui jalur Sekolah	desa / keg	masya temanggung	16.500.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
		Kab Temanggung	lomba mural tingkat sekolah, film tingkat remaja dan jambore PIK Remaja se Kab	kegiatan	masya temanggung	-		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
								<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	60.000.000

								SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal					
								Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	90.000.000
								Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota					
5	Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB	DPPKBPPPA	Terdatanya jumlah peserta KB aktif	bulan	karyawan DPPKBPPPA	55.000.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	400.000.000
3	Penunjang DAK	Kab Temanggung	Laksanakan Kegiatan DAK	kegiatan	masya temanggung	55.000.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
								Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
								Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	205.000.000
4	Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten	Kab Temanggung	terlaksananya koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten. koordinasi koalisi kependudukan dan forum antar umat beragama peduli kependudukan	kegiatan	masya temanggung	27.500.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	5.460.000.000
								Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	1.350.000.000
								Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
								Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	280.000.000
								Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	43.000.000

2	Peningkatan Kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB	DPPKBPPPA	Honor PPKBD 289 org @ Rp. 450.000, Honor Sub PPKBD 1619 org @ Rp. 150.000, Pelatihan Kader KB 40 org @ Rp. 150 (uang saku)	semester	masya temanggung	400.000.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	420.000.000
C	Program Kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota					
								Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	65.000.000
1	kegiatan masyarakat peduli KB	Kab Temanggung	terfasilitasnya kegiatan masyarakat peduli KB dan Tersusunnya rapaerda pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada moment moment tertentu	kegiatan	masya temanggung	122.000.000		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	40.000.000
2	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab Temanggung	terlaksananya keg pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	orang	masya temanggung	82.500.000		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	382.351.700
		DPPKBPPPA	pelatihan bidan untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi	orang	bidan Kab Temanggung	-		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	1.430.000.000
3	Pengadaan sarpras KB DAK	DPPKBPPPA	terlaksananya kegiatan DAK	kegiatan	masya temanggung	1.575.000.000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
4	Bantuan operasional DAK KB (BOKB DAK)	DPPKBPPPA	terlaksananya kegiatan BOK	bulan	masya temanggung	5.531.412.000		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	40.000.000
5	Pengembangan dan pemantapan kampung KB	Kab Temanggung	pemberdayaan kampung KB di Kabupaten Temanggung	unit	kampung KB	250.000.000		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	83.785.000
								Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	2.000.000.000

A	Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					
							Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
1	Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)	Kab Temanggung	Terbinanya 20 kelompok BKB, BKL, BKR	kegiatan	masya temanggung	40.000.000	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	35.000.000
2	Pelatihan UPPKS	Kab Temanggung	Terlatihnya kelompok UPPKS (perkecamatan 2 orang)	kegiatan	masya temanggung	40.000.000	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	30.000.000
		Kab Temanggung	Pemantapan dan Pengembangan AKU (Asosiasi Kelompok Usaha)	kegiatan	masya temanggung		<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	50.000.000
3	Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana	Temanggung	Terfasilitasinya penyuluhan Narkoba dan PMS,KRR, lomba genre	kegiatan	masya temanggung	25.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
4	Fasilitasi Pemantapan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Temanggung	Terfasilitasinya pemantapan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	kegiatan	masya temanggung	70.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. TMG		Kegiatan	Masya. TMG	85.000.000
	Total DAU						Total DAU					6.416.360.166
	Total DAK						Total DAK					10.830.000.000

Total anggaran					15.652.294.268	Total anggaran					17.246.360.166
----------------	--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------

Sumber : DPPKBPPPA .Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel di atas hasil penyandingan rancangan awal dibandingkan rancangan awal RPJMD dan hasil penelaahan terhadap rancangan RENJA yang disampaikan pada saat Forum Perangkat Daerah terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Turunnya pagu Gaji pada Ranwal dengan Renja 2021 . dikarenakan adanya mutasi seluruh UPT DPPKBPPPA , ke opd lain , dan melimpahkannya urusan kepegawaian dan gaji dari seluruh Penyuluh KB yang jadi urusan Pusat
- b. Adanya kegiatan di tahun 2020 yang dihapus karena adanya dampak dari pandemik covid 19 , yang harus dituangkan di tahun renja 2021 yang meliputi :
 1. Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB
 2. Penyusunan raperda pengendalian penduduk , yang di permendagri dimasukkan dalam kegiatan rapat pengendalian program KKBPBPK
 3. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - 4 . adanya menu usulan baru sesuai kebutuhan yang ada di permendagri 90/ tahun 2019 , yaitu pengadaan meubeler .
- c. Pagu Anggaran yang bersumber dari DAK fisik Reguler dan penugasan sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi TA 2021 ,meningkat berdasarkan Pagu anggaran dari aplikasi morena dari BKKBN.yang meliputi pagu Reguler Rp. 1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang di Anggaran Ranwal sebesar 1.500.000.000,00 dan penugasan sebesar Rp. 280.000.000 Di ranwal belum ada kegiatan
- d. Untuk kegiatan yang bersumber dari DAK non FISIK , sesuai kebutuhan mengusulkan angka sebesar Rp. 9.120.000.000,- ada usulan tambahan sebesar Rp. 3.588.588.000 dari ranwal sebesar Rp 5. 531.412.000

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh DPPKBPPPA dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.29

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
		NIHIL			

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPKBPPPA hanya menindak lanjuti program yang ada di propinsi jawa tengah dan program Nasional/ BKKBN , dan dari Kementrian PPPA . untuk DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung saat ini di tahun 2020 , ada inovasi kegiatan KIE(Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang bisa diterapkan di saat pandemik covid 19 yaitu SILAGA / Simulasi langkah Keluarga (juknis SILAGA telah dibuat)

Tabel 2 .30
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020

No .	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SILAGA (Simulasi Langkah Keluarga)	1. Pik Remaja 2. Duta Genre 3. PPKBD dan Sub PPKBD 4. Institusi Masyarakat Pedesaan / IMP 5. Pelaku KIE	APBD	1. Program Bangga Kencana / Pembangunan Keluarga 2. Perlunya menggalakkan 8 fungsi Keluarga 3. Metode Diskusi dengan menghadirkan narasumber 4. Membuat beberan simulasi dan menyusun pesan 5. Aplikasikan SILAGA dengan kreatifitas moderator	Terlaksananya Kie model KREATIF	Terbentuknya kelompok SILAGA	DPPKBP PPA/ 2020

2.7 Penghargaan

Selama tahun 2019 Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPKBPPPA ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.31
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Madya tahun 2019	Kemen PPPA	Nasional	DPPKBPPPA
2	Peringkat III putra tingkat propinsi jateng untuk duta Genre (Generasi Ber- encana)	Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng	Provinsi	DPPKBPPPA
3	Anugrah Parahita Eka Praya (APE) Tingkat Madya	Kemen PPPA	Nasional	DPPKBPPPA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPKBPPPA lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPPKBPPPA

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2021 , maka tujuan urusan PPKBPPPA adalah

Tujuan :

- 1) Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Mewujudkan masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunkan angka pernikahan remaja
- 8) Meningkatnya kepesertaan KB
- 9) Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 10) Meningkatkan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 11) Meningkatkan prosentase terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 12) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 13) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;

- 14) Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 15) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

16) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari Urusan PPKBPPPA adalah :

- 1) Terwujudnya masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Terwujudnya masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
- 8) Menurunnya angka pernikahan remaja
- 9) Meningkatnya kepesertaan KB
- 10) Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 11) Meningkatnya kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 12) terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 13) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 14) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah;
- 15) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 16) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 17) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas DPPKBPPPA Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel . 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada DPPKBPPA

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2019
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Tersedianya data mikro keluarga di desa atau kelurahan yang lengkap	Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan	%	100	100
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100

				Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	%	14,3	1,82
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	81,23	77,85
				Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	%	49	46.01
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	6,72	11.17

				Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	%	100	100
				Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk	%	0,82	0.88
				Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	%	85,00	76.00
				Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	4.00
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	80,00

			Keluarga Sejahtera (Ks)				
				Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	%	86,00	85,00
		meningkatnya presentase keluarga sejahtera		Persentase keluarga sejahtera III plus	%	40,00	40,00
				Cakupan Kampung KB di Desa IDM	%	48,33	29,85
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban terhadap perempuan	%	0,005	0.0020

		Perlindungan Anak					
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak	%	0,0034	0.0019
				Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	30,00	20.00
				Persentase terbentuknya desa layak anak	%	4,15	2,77
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga		1:4200 0	1;5601
			Program Pengarustamaan Gender Dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	96,15	95,62

			Pemberdayaan Perempuan				
	Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya kesetaraan gender		Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	%	75,17	32,28
				Persentase perangkat daerah yang memiliki data pilah gender dan anak	%	40,50	38,45
				Persentase ket-erwakilan per-empuan di DPRD Kabupaten	%	31,11	31,11

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPPKBPPPA Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021. Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPPKBPPPA Kab. Temanggung Tahun 2021

RANCANGAN RENJA DPPKBPPPA TAHUN 2021			RKPD DPPKBPPPA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	BELANJA LANGSUNG				
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3.000.000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3.000.000
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3.872.300		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3.872.300
	Administrasi Keuangan			Administrasi Keuangan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.614.060.166		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.614.060.166
	Belanja tidak langsung			Belanja tidak langsung	
	Belanja Pegawai	3.614.060.166		Belanja Pegawai	3.614.060.166
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.347.147.339		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.347.147.339
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.266.912.827		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.266.912.827
	Administrasi Umum			Administrasi Umum	
A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.050.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.050.000

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.500.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	30.500.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	282.450.000			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	282.450.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	159.830.000			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	159.830.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.100.000			Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.100.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	1.200.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	1.200.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.491.000			Penyediaan Makanan dan Minuman	15.491.000	
B	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25.750.000			Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	25.750.000	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	
3	Pengadaan Mebeleur	50.000.000			Pengadaan Mebeleur	50.000.000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15.000.000			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15.000.000	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.750.000			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	38.750.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	
C	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	11.250.000			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	11.250.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
D	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
1	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	20.000.000			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>	20.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	50.000.000			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>	50.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
3	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	45.000.000			<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	45.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
4	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
5	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
6	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000			<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
7	<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	20.000.000			<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	20.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
8	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	45.000.000			<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	45.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
9	<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50.000.000			<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		

	<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>	60.000.000			<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>	60.000.000	
	<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	80.000.000			<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>	90.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		
5	<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	100.000.000			<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	400.000.000	
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>				<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	205.000.000	
4	<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	3.640.000.000			<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	5.460.000.000	
	<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	1.350.000.000			<i>Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK</i>	1.350.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	500.000.000			<i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	280.000.000	
	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	43.000.000			Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	43.000.000	
2	<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	420.000.000			<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	420.000.000	
C	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		
	<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	65.000.000			<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	65.000.000	
1	<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	40.000.000			<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	40.000.000	
2	<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	392.351.700			<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	382.351.700	

	<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	1.000.000.000			<i>Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	1.430.000.000	
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
4	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	40.000.000			<i>Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	40.000.000	
5	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	83.785.000			<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	83.785.000	
	<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	1.000.000.000			<i>Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	2.000.000.000	
A	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
1	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	35.000.000			<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	35.000.000	
2	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	30.000.000			<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	30.000.000	
	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	50.000.000			<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	50.000.000	
3	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
4	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	85.000.000			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	85.000.000	
	Jumlah	13.813.360.166				17.246.360.166	

Dari tabel 3.2 di atas adanya perubahan anggaran yang disebabkan

- a. Turunnya pagu Gaji pada Ranwal dengan Renja 2021 . dikarenakan adanya mutasi seluruh UPT DPPKBPPPA , ke opd lain , dan melimpahkannya urusan kepegawaian dan gaji dari seluruh Penyuluh KB yang jadi urusan Pusat
- b. Adanya kegiatan di tahun 2020 yang dihapus karena adanya dampak dari pandemik covid 19 , yang harus dituangkan di tahun renja 2021 yang meliputi :
 1. Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB
 2. Penyusunan raperda pengendalian penduduk , yang di permendagri dimasukkan dalam kegiatan rapat pengendalian program KKBPK
 3. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - 4 . adanya menu usulan baru sesuai kebutuhan yang ada di permendagri 90/ tahun 2019 , yaitu pengadaan meubeler .
- c. Pagu Anggaran yang bersumber dari DAK fisik Reguler dan penugasan sub bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi TA 2021 ,meningkat berdasarkan Pagu anggaran dari aplikasi morena dari BKKBN.yang meliputi pagu Reguler Rp. 1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang di Anggaran Ranwal sebesar 1.500.000.000,00 dan penugasan sebesar Rp. 280.000.000 Di ranwal belum ada kegiatan
- d. Untuk kegiatan yang bersumber dari DAK non FISIK , sesuai kebutuhan mengusulkan angga sebesar Rp. 9.120.000.000,- ada usulan tambahan sebesar Rp. 3.588.588.000 dari ranwal sebesar Rp 5. 531.412.000

Tabel 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKBPPA KAB TEMANGGUNG
TAHUN 2021

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BELANJA TIDAK LANGSUNG											
	BELANJA LANGSUNG											
X	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
X XX 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.017.965.000										
X XX 1 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.872.300	4.264.200	4.856.000	4.827.000	99	7.559.530	
X XX 1 2.01 1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	embur 10 juta / tahun	DPPKBPPA	12	bulan	3.000.000	4.264.200	4.856.000	4.827.000	99	3.300.000	
X XX 1 2.01 3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPKBPPA	12	bulan	3.872.300					4.259.530	
X XX 1 2.02	Administrasi Keuangan					3.614.060.166	3.614.060.166	3.507.403.488	3.393.393.690	97	3.614.060.166	
X XX 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	12	bulan	3.614.060.166	3.614.060.166	3.507.403.488	3.393.393.690	96,75	3.614.060.166	
	Belanja tidak langsung											
	Belanja Pegawai					3.614.060.166						
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.347.147.339						
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.266.912.827						
X XX 1 2.03	Administrasi Umum					795.041.000	662.853.500	575.740.300	481.364.357	89	886.920.100	
X XX 1 2.03 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	12	bulan	17.050.000	9.250.000				18.755.000	

X	XX	1	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	15.000.000						16.500.000	
					usulan baru												
X	XX	1	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPKBPPPA	12	bulan	1.200.000	1.320.000	1.920.000	1.900.000	98,96		1.320.000	
X	XX	1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPPKBPPPA	12	bulan	15.491.000	24.270.000	18.341.000	10.226.500	55,76		17.040.100	
X	XX	1	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPKBPPPA	12	bulan	25.750.000	30.450.000	42.000.000	41.952.600	99,89		28.325.000	
X	XX	1	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	20.000.000	4.250.000	4.936.800	4.910.000	99,46		22.000.000	
X	XX	1	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.460.000	94,60		11.000.000	
X	XX	1	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	DPPKBPPPA	12	bulan	50.000.000						55.000.000	
					usulan baru												
X	XX	1	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	20.000.000						22.000.000	
X	XX	1	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPPKBPPPA	12	bulan	15.000.000						16.500.000	
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL												
X	XX	1	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBPPPA	12	bulan	38.750.000						42.625.000	
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL												

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X XX 1 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	10.000.000	15.000.000	15.000.000	14.535.000	96,90	11.000.000	
X XX 1 2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					11.250.000	11.250.000					
X XX 1 2.04 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPPKBPPPA	60	orang	11.250.000	11.250.000				12.375.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					115.000.000	108.205.980	81.749.400	76.443.300		126.500.000	
2 8 2 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan Dokumen ARG pada Lembaga Pemerintahan										
2 8 2 2.01 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Kab TMG			20.000.000	15.811.580	18.513.700	13.261.200	72	22.000.000	
	Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG											
2 8 2 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Edukasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										

2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Kab TMG			50.000.000	48.329.000	35.021.900	35.016.900	100	55.000.000	
					Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender											
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan										
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab TMG			45.000.000	44.065.400	28.213.800	28.165.200	100	49.500.000	
					peningkatan kapasitas organisasi perempuan											
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					30.000.000	23.673.000	30.394.500	28.582.250		33.000.000	
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 8 3 2.01 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi dan layanan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Kab TMG			10.000.000	15.683.000	14.895.000	14.741.250	99	11.000.000	
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
2 8 3 2.02 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan perlindungan Perempuan dan Anak				10.000.000	7.990.000	15.499.500	13.841.000	89	11.000.000	
	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)											
2 8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2 8 3 2.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab TMG			10.000.000					11.000.000	
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					20.000.000	23.946.000	18.208.600	18.099.700		22.000.000	

2	8	4	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	8	4	2.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
2	8	4	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	8	4	2.02	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 8 4 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
2 8 4 2.03 1	<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersediannya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG			20.000.000	23.946.000	18.208.600	18.099.700	99	22.000.000	
	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB</i>											
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											
2 8 5 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota											
2 8 5 2.01 1	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>											
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					95.000.000	58.357.240	76.266.650	75.475.886		104.500.000	
2 8 6 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
2 8 6 2.01 1	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksannnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan</i>	Kab TMG			45.000.000	41.084.000	54.776.750	54.253.486	99	49.500.000	
	<i>advokasi dan pengembangan kota layak anak (KLA)</i>											
2 8 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
2 8 6 2.02 1	<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersediannya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Kab TMG			50.000.000	17.273.240	21.489.900	21.222.400	99	55.000.000	
	<i>Penyelenggaraan kegiatan forum anak</i>											
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					10.000.000					11.000.000	
2 8 7 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											

2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersediannya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab tmg			10.000.000							11.000.000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)											
2 8 7 2.02 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2 8 7 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2 8 7 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					550.000.000	79.297.730	165.803.000	153.516.736		594.000.000	
2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											

2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Meningkatnnya pelaksanaan program BANGGA KENCANA (pembangunan keluarga kependudukan dan Keluarga Berencana)sampai keseluruh elemen masyarakat di Kabupaten Temanggung	20 sekolah di 20 Kecamatan ", MA Alhuda , SMA Muh NGDRJ,SMA Candiroti,SMK Ganesa , SMA Pringsurat, SMP bejen , SMK Bhakti Karya Kaloran , SMP 3 kandangan ,mts Muh Kranggan, MTSN Parakan, Mts Maarif Jumo, SMP 2 Tlogomulyo,SMPN Bansari,SMP N 1 Tembarak, SMPN 6 Temanggung, SMP N 1 Kledung , SMP N 1 Wonoboyo, SMP N 1 Tretep , SMP N 1 Gemawang			60.000.000	61.407.730	28.396.000	24.697.000	87	66.000.000	
					pelayanan kie											
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	1 terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPk 2.tersusunnya raperda kependudukan dan KB	DPPKBPPA			90.000.000	17.890.000	66.295.000	60.230.250	91	88.000.000	
					Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten											
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota											
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga							71.112.000	68.589.486	96	-	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										-	
					Pendataan Keluarga,Pencatatan dan pelaporan KB	(program prioritas tahun 2021) Terlaksananya Pendataan	20 kecamatan			400.000.000	280.408.020					

					<i>Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB</i>										
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				11.799.136.700	13.797.307.505	7.736.451.000	5.949.630.979		9.657.050.370	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						6.095.000.205					
2 14 3 2.01 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terpenuhinya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	DPPKBPPPA			205.000.000	5.743.624.000	5.531.412.000	4.017.437.779	72,63	225.500.000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2 14 3 2.01 7	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksannnya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	20 kecamatan			5.460.0000000					4.004.000.000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2 14 3 2.01 8	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Terlaksannnya Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	20 Kecamatan			1.350.000.000					1.485.000.000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											

2	14	3	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										
2	14	3	2.02	2 <i>Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	<i>Terpenuhinnnya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB</i>	DPPKBPPPA		280.000.000	1.300.000.000	1.356.449.000	1.299.061.000	96	550.000.000	DAK
				<i>pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)</i>										
2	14	3	2.02	3 Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksannnya Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	20 Kecamatan		43.000.000	38.538.000	62.334.600	40.893.700	66	47.300.000	
				Penunjang DAK										
2	14	3	2.02	4 <i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	<i>Terlaksannnya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	20 kecamatan		420.000.000	347.397.900	389.756.000	387.381.000	99	462.000.000	
				<i>Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB</i>										
2	14	3	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota										
2	14	3	2.03	1 <i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	<i>Terlaksannnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	DPPKBPPA dan 26 FaSKES		65.000.000					71.500.000	DAK

				<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>															
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 3 2.03 2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPPA dan 26 Faskes			40.000.000					44.000.000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2 14 3 2.03 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Kab TMG			382.351.700	173.411.000	356.622.000	185.796.500	52,10	431.586.870	
	Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi											
2 14 3 2.03 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terpenuhinnnya Sarana Penunjang Pelayanan KB	DPPKBPPPA			1.430.000.000					1.100.000.000	DAK
	pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)											
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
2 14 3 2.04 1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kab TMG			40.000.000	15.551.400	39.877.400	19.061.000	47,80	44.000.000	
	Kegiatan Masyarakat Peduli KB											
2 14 3 2.04 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Kab TMG			83.785.000	83.785.000				92.163.500	

					Pengembangan dan pematapan kampung KB														
2	14	3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksannnya Pembinaan Terpadu Kampung KB	20 Kecamatan			2.000.000.000								1.100.000.000	DAK
					Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana														
2	14	4			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					200.000.000	206.809.720	100.206.900	99.503.376					220.000.000	
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksanya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 kecamatan			35.000.000	31.994.200	40.517.500	39.978.250	99				38.500.000	
					Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)														
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kecamatan			30.000.000	34.163.200	28.039.900	27.927.626	99,60				33.000.000	
					Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera														

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 4 2.01 8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksannnya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	20 kecamatan			50.000.000	87.050.720	19.228.500	19.176.500	99,73	55.000.000	
	Pembinaan Generasi berencana											
2 14 4 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											
2 14 4 2.02 2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksannnya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kecamatan dan DPPKBPPPA			85.000.000	53.601.600	12.421.000	12.421.000	100	93.500.000	
	Koordinas dan Fasilitasi Program KKBPK											
	TOTAL DAU					6.416.360.166	5.731.808.856	5.409.218.838	4.964.338.495		7.057.996.183	
	TOTAL DAK					10.830.000.000	7.043.624.000	6.887.861.000	5.316.498.779		8.580.000.000	
	TOTAL					17.246.360.166	12.775.432.856	12.297.079.838	10.280.837.274		15.637.996.183	

				KESELURUHAN															
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun rekonsiliasi politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPKBPPPA untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ranwal Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPPKBPPPA . itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPKBPPPA dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Kerja (RENJA) DPPKBPPPA Tahun 2021 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun rekonsiliasi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021 . Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasai anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 10.280.837.274 ,(83,6%) dari Pagu Rp. 12.297.079.838

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 DPPKBPPPA mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.495.024.836 , dimana dengan terjadinya pandemic covid 19 , sampai mengalami pemotongan anggaran menjadi 11,854.128.706 .dan pada bulan juni juga mengalami pemotongan anggaran menjadi 11.350.316.206 (belum disyahkan)

Renja tahun 2021,DPPKBPPPA mengusulkan anggaran sesuai Pagu dan kebutuhan sebesar Rp. 17.246.360.166, yang bersumber dari dana DAU Rp. 6.416.360.166 dan DAK sebesar Rp. 10.830.000.000

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKBPPPA dalam tahun 2021 ada 3 urusan yang terdiri 10 program dan 22 kegiatan dan 65 sub kegiatan , :

1. Urusan penunjang : 1 program dan 4 kegiatan dan 35 Sub kegiatan
2. Urusan Pengendalian Penduduk : , 3 program 8 kegiatan dan 20 kegiatan
 - a. Program Pengendalian Penduduk , 2 kegiatan , 3 sub kegiatan
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana ,4 kegiatan . 13 sub kegiatan
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 2 kegiatan , 4 sub kegiatan

3.. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) . ada 6 Program dan 10 kegiatan dan 10 sub kegiatan

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPKBPPPA Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

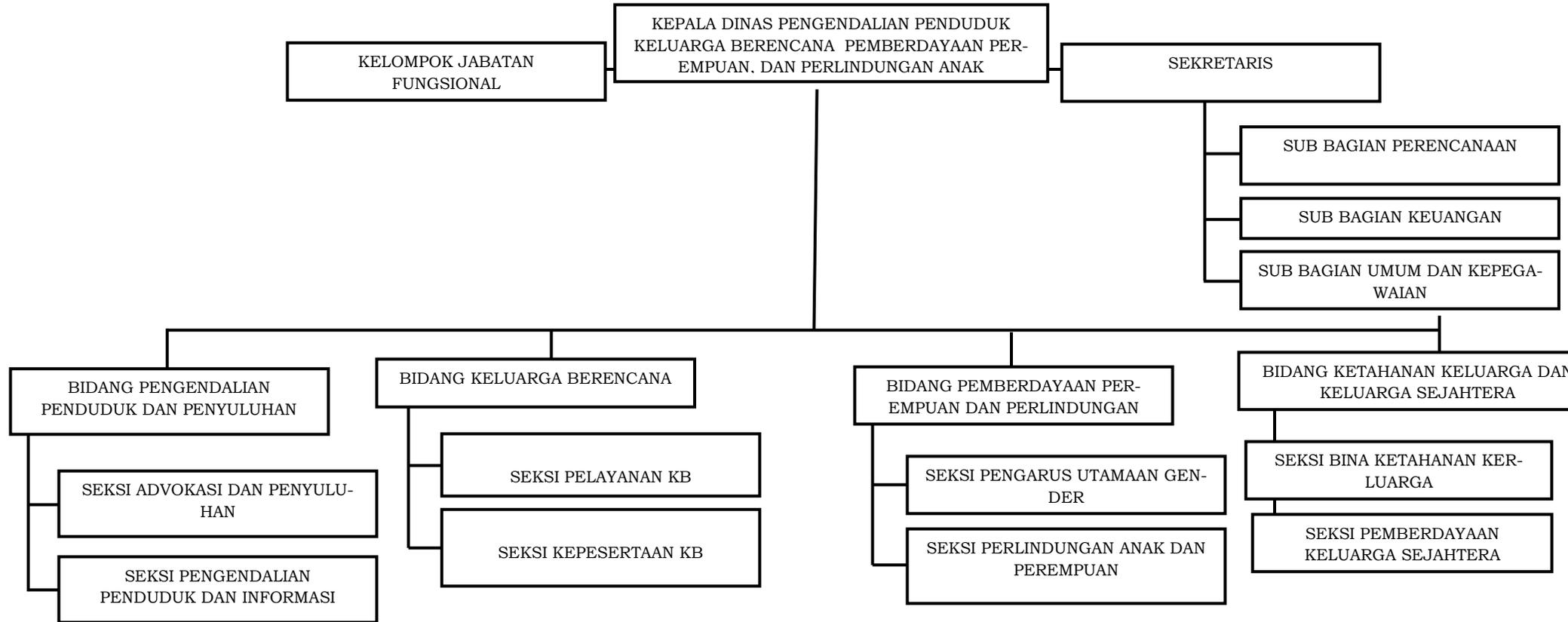
Temanggung, Juli 2020

KEPALA DPPKBPPPA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra.WARA ANDIJANI, M.Sj.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199002 2 001

DINAS PPKBPPPA KAB TEMANGGUNG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK



RANCANGAN RENJA DPPKBPPA TAHUN 2021

PD : DINAS PPKBPPA

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG														
	BELANJA LANGSUNG														
X	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
X	XX	1													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,017,965,000													
X	XX	1	2.01				6,872,300	4,264,200	4,856,000	4,827,000	99	5,000,000			
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	lembur 10 juta / tahun	DPPKBPPA	12	bulan	3,000,000	4,264,200	4,856,000	4,827,000	99	2,000,000
X	XX	1	2.01	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DPPKBPPA	12	bulan	3,872,300					3,000,000
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan					3,614,060,166	3,614,060,166	3,507,403,488	3,393,393,690	97	3,614,060,166
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPA	12	bulan	3,614,060,166	3,614,060,166			96.75	
	Belanja tidak langsung									3,507,403,488		3,393,393,690			3,614,060,166
	Belanja Pegawai														
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN														
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN														
X	XX	1	2.03		Administrasi Umum					795,041,000	662,853,500	575,740,300	481,364,357	89	713,500,000
X	XX	1	2.03	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DPPKBPPA	12	bulan	17,050,000	9,250,000				19,050,000
	perjalanan dinas dalam daerah														
X	XX	1	2.03	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPPKBPPA	12	bulan	39,100,000	35,000,000	49,992,000	29,920,376	60	32,500,000
X	XX	1	2.03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPA	12	bulan	10,000,000					10,000,000
X	XX	1	2.03	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBPPA	12	bulan	30,500,000	67,260,000	99,876,000	77,367,401	77	25,000,000
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL														

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X XX 1 2.03 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DPPKBPPPA	12	bulan	282,450,000	282,400,000	281,339,100	239,456,630	85	240,000,000	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN											
X XX 1 2.03 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	159,830,000	132,440,000	6,679,400	6,658,250	100	92,000,000	
	JASA KEBERSIHAN KANTOR											
	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN GEDUNG/KANTOR											
X XX 1 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	23,100,000	23,639,000	26,657,000	26,418,100	99.10	25,000,000	
X XX 1 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPPKBPPPA	12	bulan	9,820,000	14,324,500	15,000,000	14,607,000	97.38	7,500,000	
X XX 1 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	2,000,000	2,000,000	3,999,000	3,952,500	98.84	2,000,000	
X XX 1 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	15,000,000					20,000,000	
	usulan baru											
X XX 1 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	DPPKBPPPA	12	bulan	1,200,000	1,320,000	1,920,000	1,900,000	98.96	1,200,000	
X XX 1 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	DPPKBPPPA	12	bulan	15,491,000	24,270,000	18,341,000	10,226,500	55.76	10,000,000	
X XX 1 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	DPPKBPPPA	12	bulan	25,750,000	30,450,000	42,000,000	41,952,600	99.89	25,750,000	
X XX 1 2.03 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	20,000,000	4,250,000	4,936,800	4,910,000	99.46	20,000,000	
X XX 1 2.03 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,460,000	94.60	10,000,000	
X XX 1 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	DPPKBPPPA	12	bulan	50,000,000					50,000,000	
	usulan baru											
X XX 1 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	20,000,000					10,000,000	
X XX 1 2.03 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	DPPKBPPPA	12	bulan	15,000,000					20,000,000	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL											
X XX 1 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPPKBPPPA	12	bulan	38,750,000					60,000,000	
	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL											
X XX 1 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPPKBPPPA	12	bulan	10,000,000	15,000,000	15,000,000	14,535,000	96.90	10,000,000	

KODE REKENING				Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
						Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	XX	1	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					11,250,000	11,250,000					
X	XX	1	2.04	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPPKBPPPA	60	orang	11,250,000	11,250,000				23,500,000	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2	8	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					115,000,000	108,205,980	81,749,400	76,443,300		95,000,000	
2	8	2	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	2	2.01	3 <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>		Kab TMG			20,000,000	15,811,580	18,513,700	13,261,200	72	22,000,000	
				<i>Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG</i>											
2	8	2	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	2	2.02	2 <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>		Kab TMG			50,000,000	48,329,000	35,021,900	35,016,900	100	35,000,000	
				<i>Pelatihan kepemimpinan perempuan dan pengarusutamaan gender</i>											
2	8	2	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	2	2.03	2 <i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Kab TMG			45,000,000	44,065,400	28,213,800	28,165,200	100	38,000,000	
				<i>peningkatan kapasitas organisasi perempuan</i>											
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					30,000,000	23,673,000	30,394,500	28,582,250		60,000,000	
2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
2	8	3	2.01	2 <i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		Kab TMG			10,000,000	15,683,000	14,895,000	14,741,250	99	25,000,000	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	3	2.02									
2	8	3	2.02	2			10,000,000	7,990,000	15,499,500	13,841,000	89	10,000,000
2	8	3	2.03									
2	8	3	2.03	2			10,000,000					25,000,000
2	8	4					20,000,000	23,946,000	18,208,600	18,099,700		22,000,000
2	8	4	2.01									
2	8	4	2.01	1								
2	8	4	2.02									
2	8	4	2.02	1								
2	8	4	2.03									
2	8	4	2.03	1			20,000,000	23,946,000	18,208,600	18,099,700	99	22,000,000

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8	5										
2	8	5	2.01									
2	8	5	2.01	1								
2	8	6										
2	8	6	2.01									
2	8	6	2.01	1								
2	8	6	2.02									
2	8	6	2.02	1								
2	8	7										
2	8	7	2.01									
2	8	7	2.02									
2	8	7	2.02	1								

KODE REKENING	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 8 7 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2 8 7 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					140,000,000	79,297,730	165,803,000	153,516,736		340,000	
2 14 2 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
2 14 2 2.01 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		KAB TEMANGGUNG			60,000,000	61,407,730	28,396,000	24,697,000	87	60,000,000	
	pelayanan kie											
2 14 2 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK		Kab TMG			80,000,000	17,890,000	66,295,000	60,230,250	91	80,000,000	
	Rakor Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten											
2 14 2 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota											
2 14 2 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga							71,112,000	68,589,486	96	100,000,000	
2 14 2 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB										100,000,000	
	Pendataan Keluarga, Pencatatan dan pelaporan KB	(program prioritas tahun 2021)	Kab TMG			400,000,000	280,408,020					
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					8,776,136,700	13,797,307,505	7,736,451,000	5,949,630,979		9,540,000,000	
2 14 3 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						6,095,000,205					
2 14 3 2.01 3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Kab TMG			205,000,000	5,743,624,000	5,531,412,000	4,017,437,779	72.63	225,500,000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.3.2.01.7	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Kab TMG			3,640,000,000					4,004,000,000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2.14.3.2.01.8	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK		Kab TMG			1,350,000,000					1,485,000,000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											
2.14.3.2.02.2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Kab TMG			500,000,000	1,300,000,000	1,356,449,000	1,299,061,000	96	500,000,000	DAK
	pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)											
2.14.3.2.02.3	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Kab TMG			40,000,000	38,538,000	62,334,600	40,893,700	66	40,000,000	
	Penunjang DAK											
2.14.3.2.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Kab TMG			420,000,000	347,397,900	389,756,000	387,381,000	99	420,000,000	
	Peningkatan kapasitas PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader KB											
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota											
2.14.3.2.03.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Kab TMG			65,000,000					71,500,000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2.14.3.2.03.2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kab TMG			40,000,000					44,000,000	DAK
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana											
2.14.3.2.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Kab TMG			392,351,700	173,411,000	356,622,000	185,796,500	52.10	520,000,000	
	Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi											
2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kab TMG			1,000,000,000					1,000,000,000	DAK
	pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)											

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
2 14 3 2.04 1	<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kegiatan Masyarakat Peduli KB</i>		Kab TMG			40,000,000	15,551,400	39,877,400	19,061,000	47.80	40,000,000	
2 14 3 2.04 2	<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>		Kab TMG			83,785,000	83,785,000				90,000,000	
	<i>Pengembangan dan pemantapan kampung KB</i>											
2 14 3 2.04 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Kab TMG			1,000,000,000					1,100,000,000	DAK
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana</i>											
2 14 4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)					200,000,000	206,809,720	100,206,900	99,503,376		180,000,000	
2 14 4 2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>											
2 14 4 2.01 3	<i>Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>		Kab TMG			35,000,000	31,994,200	40,517,500	39,978,250	99	40,000,000	
	<i>Pembinaan Tribina (BKB,BKR,BKL)</i>											
2 14 4 2.01 4	<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>		Kab TMG			30,000,000	34,163,200	28,039,900	27,927,626	99.60	40,000,000	
	<i>Koordinasi Penguatan Ekonomi Keluarga Sejahtera</i>											
2 14 4 2.01 8	<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>		Kab TMG			50,000,000	87,050,720	19,228,500	19,176,500	99.73	25,000,000	
	<i>Pembinaan Generasi berencana</i>											
2 14 4 2.02	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>											

